

Hasil Plagiasi Kontribusi Investasi Swasta dan Belanja Modal Pemerintah

by Didin Fatihudin Dosen Fe

Submission date: 27-Jun-2019 02:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1147417016

File name: Artikel_Jurnal_KONTRIBUSI_INVESTASI_DI_MADURA-_NCFBUKWM2014.pdf (133.99K)

Word count: 5614

Character count: 37588

**KONTRIBUSI INVESTASI SWASTA DAN BELANJA MODAL
PEMERINTAH TERHADAP PERTAMBAHAN PDRB,
SERAPAN TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN
EMPAT KABUPATEN DI PULAU MADURA**

Oleh :

Didin Fatihudin, Dahruji, Q.A.Nailufarh

Economic faculty, Muhammadiyah University of Surabaya

Jl. Sutorejo 59 Telp. 031-3811966 Fax.031-3813096

email : dfatihudin@yahoo.co.id ;

nailufarh@yahoo.com ;

dahruji@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study examines the effect of private investment and government capital expenditures to increase in GDP, employment and well-being of the four counties on the island of Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). Ex post facto research methods, quantitative techniques through observation, interviews and documentaries. The processed data is secondary data derived from government agencies over the five year period 2002 to 2006, Path analysis model Analisis.

The results showed; (1) private investment gain significant positive effect on GDP, meaning whenever there is increase in private investment led to an increase in the GDP gain of four districts on the island of Madura. (2) Private investment significant positive effect on labor absorption. This means that whenever there is increase in private investment will increase employment four counties on the island of Madura. (3) government capital spending significant positive effect on GDP gain of four districts on the island of Madura. (4) the government's capital spending is positive but not significant effect on the absorption of labor. It means the government capital spending has very little direct influence on labor absorption. The results of this study support the hypothesis rejects the fourth. (5) GDP Added significant positive effect on labor absorption four counties on the island of Madura. (6) Added GDP is not significant positive effect on the welfare of society. The results of this study support the hypothesis rejected. (7) Uptake of labor is not a significant negative effect on welfare. This means that the increase in employment is not always followed by an increase in the welfare of the people of four districts on the island of Madura.

Keywords: Investment, Capital expenditure, Labor, Welfare

PENDAHULUAN

Pertambahan PDRB (*product domestic regional bruto*) merupakan salahsatu tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah). Pembangunan ekonomi menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan bertambahnya pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan masyarakat yang terus meningkat dapat berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi, simpanan, investasi, pengeluaran agregat dan pertumbuhan ekonomi.

Semakin majunya perekonomian suatu daerah dapat ditandai dengan adanya pergeseran aktivitas perekonomian masyarakat dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan seterusnya ke sektor primer (keuangan dan jasa). Teori pertumbuhan ekonomi mulai dari teori klasik, neoklasik, hingga keynesian (Smith,

Solow, Coob-douglas, Meier, Kuznet, Chenery) meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat bergantung pada tiga hal ; sumberdaya alam (*nature*), jumlah tenaga kerja (*labor*), dan akumulasi modal untuk investasi (*capital*). Harrod-Domar, Todaro menambahkan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ; akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan belanja pemerintah. Schumpeter (1999) menekankan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan perkembangan teknologi dan inovasi dari suatu bangsa/penduduknya.

Investasi swasta maupun belanja modal pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memperbesar nilai kekayaan (assets) dan kapasitas daerah di masa mendatang. Investasi swasta dengan inovasi/teknologinya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan. Belanja modal pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi daerah seperti jalan, pelabuhan, bandara, jembatan, telepon, listrik, dan air bersih. Pulau Madura (Prov. Jawa Timur) yang di dalamnya ada empat kabupaten memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kapasitas daerah dan kesejahteraan penduduknya. Jangka panjang infrastruktur tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kapasitas daerah. Sebab itu penelitian ini bertujuan untuk memberi rekomendasi kebijakan kepada pemda tentang investasi swasta dan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan di empat kabupaten di pulau Madura.

KAJIAN TEORI DAN EMPIRIS

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan (Kuznets, H.B. Chenery, 2004:1). *Economic development is a process where by an economy's real national income over a long period of time* (Balwin, Meier dalam Abipraja, 1993:1). Teori Pembangunan ekonomi Adam Smith lebih menekankan faktor produksi modal dan pemilik modal (kapitalis). Pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha untuk kemudian ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan kapasitas produksi perusahaan. Adam Smith menganggap penting akumulasi modal (*capital acumulation*) bagi pembangunan ekonomi. Cara terbaik melakukan investasi dengan membeli mesin-mesin dan peralatan produksi. Adanya mesin modern/canggih, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas mengakibatkan peningkatan produksi perusahaan. Jika perusahaan melakukan hal yang sama, pada gilirannya output nasional meningkat yang berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Teori Pembangunan JM Keynes berbeda dengan Adam Smith. JM Keynes berusaha menggabungkan kedua paham teori pembangunan antara kapitalisme dan sosialisme, mengajukan peranan pemerintah untuk dapat memajukan perekonomian suatu negara. Schumpeter (1993:54) memiliki keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Berbeda dengan Arthur Lewis membagi perekonomian kedalam perekonomian industri dan perekonomian tradisional. Dalam perekonomian tradisional terjadi kelebihan tenaga kerja di pedesaan. Keynes menyeimbangkan kapitalisme dg sosialisme dg mempersilahkan campur tangan pemerintah. Schumpeter (1993:54) memiliki keyakinan sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Schumpeter merasa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi. Motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang disebut inovasi, dan pelakunya adalah para wiraswasta, inovator atau *entrepreneur*. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa

diterangkan dengan adanya inovasi dari para *entrepreneur*. Inovasi teknologi mampu meningkatkan kapasitas produksi secara lebih efisien. Arthur Lewis membagi perekonomian kedalam perekonomian industri dan perekonomian tradisional. Dalam perekonomian tradisional terjadi kelebihan tenaga kerja di pedesaan. Teori Dependensia dari Paul Baran, Andre Gunder Frank Negara maju eksploitasi terhadap negara miskin, negara miskin tergantung kepada negara maju. Investasi negara maju di negara miskin memang dapat meningkatkan pendapatan nasional, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja ; konglomerat/borjuis/komparador. Theotonio Dos Santos (2004:169) mengklasifikasikan ketergantungan tiga faktor internal ; ketergantungan kolonial, ketergantungan industri keuangan dan ketergantungan teknologi industri. Kemandirian negara berkembang sangat diharapkan. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi harus terus ditingkatkan, agar ketergantungan pada negara maju dapat dikurangi.

Todaro (1999:124-130) menyebutkan ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa ; (a)akumulasi modal, ; (b)pertumbuhan penduduk, dan (c) kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatannya ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* atau pendapatan dikemudian hari. Harrod-Domar; *pengeluaran pemerintah* akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Terutama peranan investasi memiliki dampak positif proses *multiplier effect* terhadap permintaan agregat dan juga pada penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, investasi yang dilakukan akan menambah *stok capital*. Setiap penambahan *stok capital* akan meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan output. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor (Jhingan,2007:67-77), yakni ; pertama, *faktor ekonomi* ; dan kedua, *faktor non ekonomi*. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumberdaya alamnya, sumberdaya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya (ekonomi). Tetapi diingat bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi jika ditunjang oleh perubahan-perubahan lembaga sosial, kondisi politik, nilai-nilai moral dan sikap budaya dalam suatu bangsa (non ekonomi).

Dalam Christopher Pass dan Bryan Lowes (1977:611) dinyatakan bahwa model pertumbuhan ekonomi Solow (*Solow economic-growth model*) suatu teori yang disusun dengan fokus pada peranan perubahan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Harrod-Domar dalam Jhingan (2007:229) memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai dampak ganda yang dimiliki investasi ; pertama, bahwa investasi dapat menciptakan pendapatan (dampak permintaan) ; kedua, dengan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dalam perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (dampak penawaran). Karena itu, selama investasi *netto* tetap berlangsung, pendapatan nyata dan *output* akan senantiasa membesar. Untuk mempertahankan tingkat *equilibrium* pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun *output*, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produksi modal meningkat.

Menurut Dornbusch (1986:236) investasi ; pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal. Barang modal (*capital stock*) itu terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Dalam neraca pendapatan nasional, pengeluaran investasi terdiri dari pengeluaran untuk pabrik dan peralatan baru, investasi persediaan, dan pembangunan rumah tinggal.

Jhingan (2007:67) menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor ; faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu

negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi yang berpengaruh pada proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Mc.Meer dalam Kajian Ekonomi Regional (2007:6) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Akan tetapi dalam dunia nyata, investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasinya.

Robinson dalam Rosyidi (2004:165) pengeluaran investasi menurut penggunaannya dibagi menjadi tiga kepentingan ; pertama, konstruksi (*construction*) ; kedua, perbaikan (*rehabilitation*), dan ketiga, perluasan (*expansion*). Konstruksi adalah pengeluaran untuk membangun sesuatu hal yang memang baru ; rehabilitasi pengeluaran yang diperuntukkan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak (menyusut). Sedangkan ekspansi yaitu pengeluaran untuk memperbesar kapasitas, mempertinggi volume atau memperlebar ruang gerak. Sukirno (2000:366) *investasi* dalam teori ekonomi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu perekonomian. Pengeluaran untuk mendirikan pabrik, membeli mesin-mesin produksi, penyediaan bahan mentah atau memperluas perkebunan sehingga mendatangkan keuntungan di masa datang.

Ada beberapa jenis investasi ; pertama, Autonomous investment dan induced investment ; kedua, Public investment dan private investment ; ketiga, Domestic investment dan foreign investment ; keempat, Gross investment dan Net investment (Rosyidi,2004:169-172). Investasi otonom (outonomous investment) adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tidak dapat berubah oleh karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. Faktor-faktor lain pendapatan yang mempengaruhi tingkat investasi seperti itu misalnya, tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, harapan para pengusaha, dan sebagainya. Teknologi dapat mengubah investasi, misalnya kemajuan teknologi perang menyebabkan banyak negara menanamkan modalnya di bidang militer. Kebijakan pemerintah dalam penerapan aliran listrik untuk daerah terpencil, walaupun GNP tidak mengalami perubahan, investasi tersebut tetap dilakukan. Investasi terimbas (*induced investment*) kebalikannya investasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara fungsional dinyatakan bahwa tingkat investasi dengan tingkat pendapatan terdapat hubungan yang positif. Investasi total yang dilakukan dalam suatu perekonomian adalah komposit dari investasi otonom ditambah investasi terimbas yang merupakan dari fungsi pendapatan.

Public investment merupakan investasi/penanaman modal yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, investasinya diarahkan untuk melayani atau menciptakan kesejahteraan rakyat banyak. Private investment ; investasi yang dilaksanakan oleh swasta, motif keuntungan di masa depan sangat berperan dalam menentukan volume investasi. Domestic investment ; penanaman modal dalam negeri di dalam negeri. dan Foreign investment ; penanaman modal asing. Negara yang banyak memiliki banyak faktor produksi alam (*natural resources*) dan atau manusia (*human resources*), tetapi tidak memiliki banyak modal (*capital*), maka akan mengundang pemodal asing, agar sumber daya tersebut dapat dioptimalkan. Gross

investment adalah penjumlahan dari investasi otonom dan investasi terimbas. Seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara. *Net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

Investasi sektor publik sering disebut juga investasi pemerintah. Definisi investasi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ; *Investasi* diartikan sebagai penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 menyebutkan *investasi pemerintah* adalah penempatan sejumlah dana atau barang oleh pemerintah pusat/daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi disini ditekankan pada penggunaan aset. Aset pemerintah (pusat/daerah) khususnya aset tetap diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut Belanja Modal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan *Belanja Modal* adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. *Belanja Modal* (Permendagri 13/2006) didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Setiap belanja modal merupakan investasi, karena secara teoritis dapat dipastikan akan ada manfaatnya.

Menurut Sopyan (Halim,2008:112) *Investasi pemerintah daerah* tercermin melalui *belanja modal* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi pengeluaran. *Belanja modal* menurut Halim (2008:5-7) adalah "capital expenditure" yang didefinisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran seperti itu memerlukan sebuah proses penilaian/penaksiran yang disebut Jones dan Pendlebury sebagai "investment appraisal". Kebutuhan investasi publik akan dibatasi oleh keterbatasan anggaran yang sediakan dan ditetapkan. Usulan investasi pemerintah dapat berbentuk ; (a) investasi penggantian, (b) investasi pertambahan kapasitas, dan (c) investasi baru. Ada beberapa perbedaan penilaian dalam menilai biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) investasi pemerintah (*public sector*) dengan investasi swasta (*private*). Investasi pemerintah tidak hanya diukur oleh aspek finansial saja seperti suku bunga, inflasi, resiko dan ketidak pastian, tetapi dinilai dari banyak aspek lainnya seperti aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek keamanan, dan aspek distribusi. Aspek-aspek inilah yang sulit untuk dihitung dalam investasi sektor publik. Terlepas dari itu investasi pemerintah melalui belanja modal sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) atau belanja pemerintah adalah penggunaan barang-barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kegiatan-kegiatan yang kongkrit berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber daya ekonomi (Budiono,1999:50). Belanja pemerintah digolongkan menjadi dua, yakni konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sukirno,2000:38).

Hasil penelitian empiris yang mendukung dan bertentangan tentang persepsi pelaku usaha terhadap daya tarik investasi di daerah, misalnya yang dilakukan oleh Komisi

Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPOD) (2001, 2002), dan KKPOD bersama USAID, The Asia Foundation (2004) dinyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi investasi di suatu daerah. Bukan hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor non ekonomi, misalnya regulasi/perda, sistem birokrasi, stabilitas politik dan keamanan. Indonesian-Netherlands Association (INA) 2008 hasil penelitiannya bahwa *One Stop Service* (OSS) pelayanan terpadu satu pintu adalah sistem pelayanan investasi di daerah yang baik untuk dilaksanakan. Studi Kim (1997) yang meneliti peranan sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Korea, menunjukkan bahwa investasi dan konsumsi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Frans Dionase (2008) ada empat faktor dominan yang mempengaruhi daya tarik investasi di Bengkulu ; (1) kebijakan daerah, (2) potensi ekonomi, (3) infrastruktur fisik dan (4) faktor keamanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya *expost facto research* pendekatan *kuantitatif* dengan analisis alur (*Path analysis*). Penelitian ini dilakukan di empat Kabupaten di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) kurun waktu lima tahun; 2002 hingga 2006. Data *time series* dan *pooled data (cross section)* diperkuat dengan *interview*. Data yang diolah berupa data publikasi resmi bersumber dari Kantor Badan Penanaman Modal, Biro Keuangan Provinsi, Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan BPS empat kabupaten di pulau Madura.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, seleksi data dan *interview* pada para pemangku kebijakan untuk deskriptif. Variabel yang diteliti meliputi ; investasi swasta, belanja modal pemerintah, penambahan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan. Investasi swasta diukur dengan realisasi penanaman modal dalam negeri/domestik dan penanaman modal asing ; Belanja modal pemerintah diukur dengan jumlah realisasi belanja modal (*capital expenditure*) dari APBD ; Pertambahan PDRB dilihat dari angka-angka PDRB per sektor. Penyerapan tenaga kerja dilihat dari angka partisipasi angkatan kerja per sektor menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia yang berpedoman pada *International Standard of Industry Classification (ISIC)*. Kesejahteraan dilihat dari IPM ; angka harapan hidup (kesehatan), angka melek huruf (pendidikan) dan pendapatan per kapita indikator dari *world Bank*.

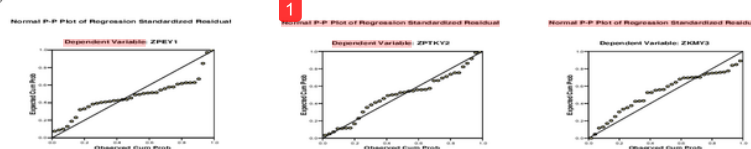
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah bergantung pada potensi alam/ekonomi daerah itu sendiri (*nature*), ketersediaan tenaga kerja (*labor*), akumulasi modal (*capital*), dan teknologi, termasuk Madura. Secara geografis Kab.Bangkalan merupakan pintu gerbang pulau Madura yang luas wilayah 1,144 km², penduduk 945.863 orang. Kab.Sampang luas wilayah 1.152,04 km², penduduk 794.914 orang. Kab.Pamekasan luas wilayah 732,85 km², penduduk 795.918 orang. Kab.Sumenep luas wilayah 2,093.457 km², penduduk 1.068.595 orang. Bila dilihat dari keluasan wilayah daerah, paling luas wilayahnya adalah Kab.Sumenep sedangkan yang paling kecil wilayahnya Kab.Pamekasan.

Keempat kab di pulau madura ini termasuk wilayah provinsi Jawa Timur, paling timur setelah Kab.Gresik dan Kota Surabaya. Walaupun dekat dengan kedua kota industri, empat kab di Madura itu pertumbuhan ekonominya masih dinilai lamban. Ini ditunjukkan oleh hasil penelitian 38 kab/kota di Jawa Timur periode 2002 hingga 2006 (Fatihudin,2011) di lihat dari GNI (*Gross National Income*) per kapita 4 kab.di pulau Madura menunjukkan bahwa ranking GNI per kapita empat kab di pulau Madura menduduki rata-rata di bawah GNI per kapita Jawa Timur yang mencapai antara 60.603,77 juta rupiah hingga 70.820,72 juta rupiah per tahun pada tahun 2006.

Kab.Sumenep urutan ke 20 dengan GNI per kapita 41.664,52 juta rupiah per tahun. Kab.Sampang urutan ke 35 dengan GNI per kapita 24.830,29 juta rupiah per tahun, bahkan GNI per kapita Kab.Pamekasan menduduki urutan ke 38 terakhir, bahkan paling kecil nilainya dari 38 kab/kota di Provinsi Jawa Timur dengan GNI per kapita hanya mencapai 20.825,29 saja.

Hasil perhitungan statistik dengan *Path Analysis* melalui uji normalitas data, uji multikolnieritas, uji kausalitas dan keterkaitan antar variabel, menunjukkan beberapa temuan ;

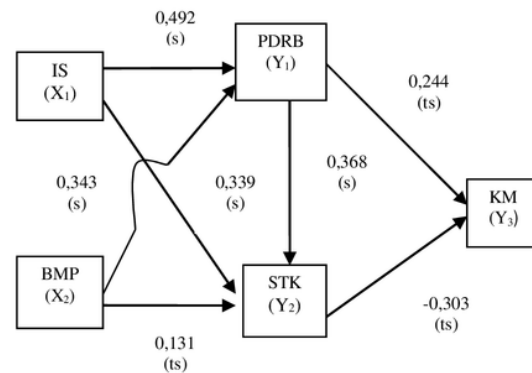


Asumsi normalitas pada model tersebut sudah terpenuhi. Nilai *variance inflation factor* (VIF) pada masing-masing model pertambahan PDRB (Y_1 /model 1), Serapan tenaga kerja (Y_2 /model 2) dan Kesejahteraan masyarakat (Y_3 /model 3) memiliki nilai VIF kurang dari 10 (sepuluh). Bila nilai VIF kurang dari 10 dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas. Ini tidak terjadi gangguan multikolinieritas.

Koefisien Jalur Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Eksogen	Variabel Endogen	Koefisien Jalur	C.R.	Prob. Value	Uji Hipotesis
IS(X_1)	PDRB(Y_1)	0,492	3,595	0,001	Signifikan
IS(X_1)	STK(Y_2)	0,339	2,147	0,031	Signifikan
BMP(X_2)	PDRB(Y_1)	0,343	2,481	0,012	Signifikan
BMP(X_2)	STK(Y_2)	0,131	0,846	0,349	Tidak Signifikan
PDRB(Y_1)	STK(Y_2)	0,358	2,171	0,028	Signifikan
PDRB(Y_1)	KM(Y_3)	0,244	1,118	0,265	Tidak Signifikan
STK(Y_2)	KM(Y_3)	-0,303	-1,326	0,161	Tidak Signifikan

Sumber : Olah data hasil Path Analysis



(diagram Path Analysis)

Variabel-variabel yang memiliki pengaruh langsung ; investasi swasta berpengaruh secara positif signifikan terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan penerimaan dukungan terhadap hipotesis pertama, yang berarti bahwa investasi swasta berpengaruh secara positif terhadap PDRB empat kabupaten di pulau Madura. Investasi swasta berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap serapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan penerimaan dukungan terhadap hipotesis kedua, yang berarti bahwa IS berpengaruh secara positif terhadap serapan tenaga kerja empat kabupaten di pulau Madura. Belanja

modal pemerintah berpengaruh secara positif signifikan terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan penerimaan dukungan terhadap hipotesis ketiga, yang berarti bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh secara positif terhadap PDRB empat kabupaten di pulau Madura. Belanja modal pemerintah berpengaruh secara positif signifikan terhadap serapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan penerimaan dukungan terhadap hipotesis keempat, yang berarti bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh secara positif terhadap serapan tenaga kerja empat kabupaten di pulau Madura. PDRB berpengaruh secara positif signifikan terhadap serapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan penerimaan dukungan terhadap hipotesis kelima, yang berarti bahwa PDRB berpengaruh secara positif terhadap serapan tenaga kerja empat kabupaten di pulau Madura. PDRB berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan penerimaan dukungan terhadap hipotesis keenam, yang berarti bahwa PDRB berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat empat kabupaten di pulau Madura. Serapan tenaga kerja berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan penerimaan dukungan terhadap hipotesis ketujuh, yang berarti bahwa serapan tenaga kerja berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat empat kabupaten di pulau Madura.

Bila dianalisis dari pengaruh totalnya (*total effect*), baik investasi swasta maupun belanja modal pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, kedua variabel tersebut semuanya memiliki pengaruh yang positif signifikan, baik melalui jalur koefisien PDRB maupun serapan tenaga kerja empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura. Tetapi kalau dianalisis dari pengaruh tidak langsungnya (*indirect effect*) menunjukkan adanya perbedaan. Pengaruh total adalah penjumlahan pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung. Apabila investasi swasta dan belanja modal pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jalur PDRB dan jalur serapan tenaga kerja menunjukkan hasilnya berpengaruh negatif. Namun pengaruh total bahwa investasi swasta dan belanja modal pemerintah sama-sama memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat baik melalui jalur PDRB maupun melalui alur serapan tenaga kerja empat kabupaten di pulau Madura. Ini menunjukkan bahwa kedua jenis Investasi Swasta (*domestic/asing*) dan belanja modal pemerintah tersebut memiliki dampak ganda (*multiplier effect*) jangka panjang terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat. Bila pendapatan masyarakat meningkat akan mendorong adanya peningkatan penerimaan di sektor pajak (PAD-APBD.) Sedangkan pada penawaran agregat, para investor akan meningkatkan produktivitas melalui peningkatan volume produksi, kapasitas produksi dan memperbesar stok kapital. Penyediaan infrastruktur melalui belanja modal pemerintah juga dapat mendorong para investor dan masyarakat untuk lebih giat dalam aktivitas ekonomi. Sehingga pada gilirannya dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat yang ada di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura tersebut.

Pertama, Investasi swasta (*domestik/asing*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura. Ini mengandung makna bahwa investasi swasta merupakan variabel penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Nilai positif ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi swasta (penanaman modal domestik/asing) menjadi penyebab adanya peningkatan pertumbuhan *Product Domestic Regional Bruto*/PDRB, pertumbuhan barang dan jasa, mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan

pendapatan per kapita masyarakat yang ada di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura.

Kedua, belanja Modal Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura. Ini mengandung makna bahwa belanja modal pemerintah yang dialokasikan dari APBD sisi belanja berupa *capital expenditure* merupakan variabel penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Nilai positif ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai belanja modal pemerintah untuk kepentingan publik seperti air, listrik, telepon, akses jalan, jembatan (misalnya Suramadu), pasar, terminal, pelabuhan, bandara dalam jangka panjang menjadi penyebab adanya peningkatan pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto/PDRB, pertumbuhan barang dan jasa, mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang ada di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura.

Ketiga, pertumbuhan *Product Domestic Regional Bruto*/PDRB (barang dan jasa) secara positif dan signifikan terhadap serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat empat kabupaten di pulau Madura. Ini mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan barang dan jasa merupakan variabel penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Nilai positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan PDRB (bertambahnya barang dan jasa) menjadi penyebab adanya peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang ada di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura.

Keempat, serapan tenaga kerja secara negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat empat kabupaten di pulau Madura. Ini mengandung makna bahwa penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan banyaknya angka partisipasi angkatan kerja merupakan variabel kurang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja belum menjadi penyebab adanya peningkatan dalam aspek kesehatan dan pendidikan, serta pendapatan per kapita masyarakat yang ada di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura. Ini disebabkan masih banyak tenaga kerja yang memperoleh upah/gaji dari perusahaan di bawah upah minimum kabupaten/UMK dan bahkan upah minimum provinsi/UMP. Walaupun masyarakat sudah banyak memiliki pekerjaan, tetapi masih merasakan kurang sejahtera. Sebab ia masih merasakan penghasilannya masih dibawah harga pasar dari kebutuhan pokok yang harus di beli setiap harinya.

Dari perspektif swasta maupun pemerintah daerah, investasi sering diartikan sebagai aktivitas pembelian obyek produktif yang ditujukan untuk memperbesar kekayaan investasi. Secara intuitif masyarakat akan menginvestasikan kekayaannya, dengan harapan akan memperoleh kontraprestasi yang lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkannya. Investasi dalam teori ekonomi diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah suku bunga, prediksi tingkat keuntungan, prediksi mengenai kondisi ekonomi ke depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan keuntungan perusahaan.

Dalam teori dinyatakan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah dalam periode tertentu itu tergantung beberapa faktor antara lain ; jumlah pajak yang diramalkan, tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah, pertimbangan politik dan stabilitas negara. Pertama, penentu besarnya pengeluaran pemerintah adalah pajak (*tax*). Pemerintah harus mampu memprediksi seberapa besar pajak yang akan diterima. Makin besar jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka semakin besar pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Kedua, kegiatan ekonomi akan diatur ke arah yang diinginkan pemerintah, misalnya mengurangi pengangguran, menghindari inflasi dan percepatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang akan menarik swasta berinvestasi dan memicu pertumbuhan ekonomi. Jika penerimaan pajak terbatas, maka pinjaman asing atau swasta dalam negeri dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, jalan-jalan, irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan, sehingga pada gilirannya kegiatan ekonomi tersebut akan banyak menyerap tenaga kerja. Ketiga, stabilitas politik dan keamanan akan berpengaruh pada besaran anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik dan keamanan negara menyebabkan kenaikan belanja pemerintah.

Teori dan hasil penelitian terdahulu banyak yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula pertumbuhan ekonomi itu selalu berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya lapangan menunjukkan bahwa tidak semestinya pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini dibuktikan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semestinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengamatan di lapangan ternyata ini terjadi disebabkan karena sebagian besar faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut sudah dikuasai oleh segelintir masyarakat yang memiliki kekuatan modal (*capital*) yang tinggi. Sementara sebagian besar masyarakat lainnya hanya diperas keringatnya sebagai tenaga kerja saja untuk melayani para konglomerat tersebut. Pendapatan tidak terdistribusi dengan baik, akan tetapi hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, sebut saja para konglomerat di daerah. Oleh karena itu tertarik untuk dikaji lebih mendalam dengan penelitian ini terhadap fakta yang sesungguhnya di lapangan, terutama di 4 (empat) kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura yang disinyalir termasuk kabupaten terendah PDRB dan tingkat kesejahteraannya jika dibandingkan dengan 34 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini memiliki keterbatasan analisis. Oleh sebab itu untuk mendekati kebenaran dari implikasi penelitian ini, sebaiknya diteliti pula tentang seberapa besar jumlah kredit (pembiayaan) dan modal kerja investasi swasta dan usaha kecil menengah/UKM yang di distribusikan perbankan di empat kabupaten di pulau Madura tersebut. Sebab pembiayaan itu diyakini dapat pula mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan penduduknya. Hasil studi empiris lainnya menunjukkan bahwa yang mempengaruhi tertariknya investor terhadap suatu daerah juga dipengaruhi oleh potensi ekonomi, kesiapan birokrasi, panjangnya birokrasi perijinan, keamanan lokasi proyek, dan infrastruktur non ekonomi lainnya. Bila keempat kabupaten di Madura ini pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan per kapita meningkat, solusinya adalah mempermudah perijinan, birokrasi yang sigap. Kesiapan masyarakat untuk menerima kultur pendatang yang berbeda dan siap menghadapi dampak positif-negatifnya industrialisasi yang datang di Madura. Memang secara teoritis bila investasi swasta dan belanja modal pemerintah meningkat akan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan. Tetapi dengan catatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh

segelintir orang saja (sebut konglomerat) tetapi ada pemerataan pendapatan bagi masyarakat umum. Begitu pula dalam hal tenaga kerja, usia produktivitas, skill, komposisi penduduk dan jumlah tenaga kerja perlu ditingkatkan terus sesuai kebutuhan industri. Terakhir, kesejahteraan ini dapat tercapai bila ada peningkatan yang signifikan dalam taraf pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita sebagaimana yang telah dicanangkan sesuai standar world bank dan kebutuhan masyarakat setempat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Investasi swasta (domestik/asing) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura.
2. Belanja Modal Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura.
3. Pertumbuhan *Product Domestic Regional Bruto*/PDRB (barang dan jasa) secara positif dan signifikan terhadap, serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat empat kabupaten di pulau Madura.
4. Serapan tenaga kerja secara negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat empat kabupaten di pulau Madura.
5. Pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan keempat kabupaten di Madura tidak akan meningkat, bila tidak ada pertumbuhan barang/jasa dari manufacturing, akumulasi modal dari para investor, dan tenaga kerja yang tidak memenuhi standar kebutuhan industri (*unskill*). Oleh sebab itu taraf pendidikan, inovasi dan teknologi perlu terus dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Gatra-Paragon Communications, *Tantangan Otonomi Daerah : Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah*, Ballroom Hotel Sahid Jaya : Jakarta, 5-6 September 2001, Makalah Seminar
- Abiprja, Soedjono, (2002), *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep, Model, Kebijakan, Instrument serta Strategi* : Surabaya, Airlangga University Press.
- S, Bappenas-UNDP. (2001). *Indonesia Human Development Report* : Jakarta
- Barro, R.J. (1990). *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth*, *Journal of Political Economy* 98: S103-S125
- Bank Indonesia kerjasama dengan P3M FE-UNIKA Soegijapranata Semarang .(2000). ; *Analisis Dampak Penerapan One Stop Service (OSS) Terhadap Peningkatan Investasi di Jawa Tengah*, BI : Semarang, Hasil Penelitian
- Budiono, (1999), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan ke Enam: Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Bank Indonesia dengan LSKE-FE Universitas Dipenogoro Semarang .(2005). ; *Pemetaan Peraturan Daerah dan potensi Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*, BI : Semarang, Hasil Penelitian.
- Bank Indonesia, Fundamental Asia Jakarta .(2006). *Investasi Di Provinsi Maluku ; Potensi, Permasalahan dan solusi Pemecahannya* : Jakarta, Hasil Penelitian.
- BPPK Departemen Keuangan .(2004). *Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression*. Jurnal Keuangan Depkeu : Jakarta. [Http://www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id).

- Dawood, Taufiq, Aliasuddin. (2008). *Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di provinsi aceh*, Hasil Penelitian Universiti Kebangsaan Malaysia, Universitas Bengkulu, Universitas Syiah Kuala, 27-28 Oktober 2008.
- Dornbusch, Rudiger, and Stanley Fisher .(1986).*Macroeconomics*, Terjemahan, Edisi ketiga : Jakarta, Eralngga.
- Halim, Abdul, Theresia Damayanti, (2007), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Pengelolaam Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Cetakan pertama : Yogyakarta, UPP STIM-YKPN.
- Indonesia-Nertherland Association ; Indonesia, Belanda, Belgia dan Luxemburg-(INA) .(2008). *Kajian Perda dan Iklim Investasi Daerah di Indonesia* : Jakarta, Hasil Penelitian INA
- Jhingan, M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi keenam Belas : Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- KPPOD .(2001). *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota ; Studi Kasus 90 Kab/Kota ; di 68 Kabupaten, 22 Kota dari 24 Propinsi di Indonesia* : Jakarta, Hasil Penelitian
- KPPOD, USAID dan The Asia Foundation .(2004). *Daya Tarik Investasi Kab/Kota di Indonesia, Persepsi Dunia Usaha*, KPPOD : Jakarta, Hasil Penelitian.
- Kim, Sung Tai .(1997). *The Role of Local Public Sectors in Regional Economic Growth in Korea*, Asia Economic Journal, 11 : 155-168
- KPPOD, USAID dan The Asia Foundation .(2007). *Survey tentang Daya Tarik Investasi Daerah pada Pelaku Usaha dari 243 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi di Indonesia* : Jakarta, Hasil Penelitian.
- Lembaga Kajian Ekonomi Regional .(2007). *Survey Faktor-Faktor Non Ekonomi Yang Mempengaruhi Iklim Investasi Di Sulawesi Selatan* : Sulawesi Selatan, Hasil Penelitian.
- Meier, GM.(1995). *Leading Issues in Economic Development*, 3rd : New York, Oxford University Press.
- Musgrave, Richard. A. and Peggy B Musgrave .(1991).*Public Finance in Theory and Practice*, Four Edition : New York, McGraw Hill,Inc.
- Pas, Christopher and Bryan Lowes .(1977).*Dictionary of Economics*, Terjemahan, Edisi kedua : Jakarta, Gelora Aksara Pratama.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 tahun 2007 *Tentang Belanja Pemerintah* : Jakarta, Depdagri RI.
- Sukirno, Sadono,(2007), *Ekonomi Makro: Perkembangan Pemikiran Ekonomi dari Klasik Hingga Keynesian* : Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, Uma,.(2003). *Research Methods for business : A Skill Building approach* (4thed) : New York, John Willey and Sons.
- Todaro, Michael P.(1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*, 1 dan 2 : Jakarta, Ghalia Indonesia.

Hasil Plagiasi Kontribusi Investasi Swasta dan Belanja Modal Pemerintah

ORIGINALITY REPORT

18%	%	5%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to iGroup Student Paper	4%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%

8	Submitted to Universitas Gunadarma Student Paper	1 %
9	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1 %
10	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
11	Submitted to University of Auckland Student Paper	1 %
12	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1 %
13	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
16	Warren J. Samuels. "Buchanan and Musgrave on Public Finance and Public Choice: a Review Essay", Journal of the History of Economic Thought, 2009 Publication	<1 %

17

Stephen J. Turnovsky. "PRODUCTIVE
GOVERNMENT EXPENDITURE IN A
STOCHASTICALLY GROWING ECONOMY",
Macroeconomic Dynamics, 1999

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On